

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) & teori peradilan (judicialprudence): termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana

Ahsin Thohari, 2006, *Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 12 Tahun III April-Juni 2006

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan International*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Mustari Pidie, 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad ke-21*, Jakarta: Gramedia Pratama

Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UIPress.

Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010, *Laporan Akhir Penelitian Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Bambang Sunggono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- B. Arief Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jakarta: Jentera
- Depdikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka
- Ermansjah Djaja, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Kajian Yuridis Normatif UU nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika
- Evi Artanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi. II, Jakarta: Sinar Grafika
- Febri Diansyah, dkk, 2011. *Laporan Penelitian, penguatan pemberantasan korupsi melalui Fungsi koordinasi dan supervisi KPK*, Jakarta: ICW
- Gunawan Goetomo, *Sejarah Perkembangan Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum Undip
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena
- I Gde Pantja Aswata, 2009. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Alumni
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan
- IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Ashiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI

- \_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Jakarta: Konstitusi Press
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta.
- Kurniawan, L. 2003, *Menyingkap Korupsi di daerah*, Jakarta, Indonesia  
Corruption Watch
- Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, 2016
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Moh.Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan, Pustaka Bangsa Press
- M. Scholtenma dalam Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Ni Nyoman Mariadi, 2011, *Kewenangan Pemerintah dalam menetapkan Penguasaan Kepemilikan Luas Tanah Pertanian*, Denpasar: Universitas Udayana
- Parman Soeparman, 2007, *Komisi Pemberantasan Korupsi peran dan wewenangnya dalam aksi anti korupsi di Indonesia*, Bandung, Java Publishing.

- Partantanto.P.A, Al Barry, M.D, 1994 *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia  
Indonesia
- Putri Dwi Handayani, 2009, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), 2011, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI
- Rizki Febari, 2015, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Romli Atmasasmita, *Latar Belakang Pembentukan KPTPK di Indonesia*, Jakarta
- R.Abdussalam, 2011, *Hukum kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Displin hukum*, Jakarta, PTIK Press, Cetakan ke empat
- R. Widyo Pramono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan pidana lainnya, sebuah perspektif jaksa & guru besar*, Jakarta, buku Kompas
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta, Pustaka Fajar
- Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi suatu pengantar*, Bandung, Rajawali Pers.

- \_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudarto, 1982, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Soehino, 2011, *Hukum Tata Negara Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku dan sedang berlaku di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: BPFE
- Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta
- Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Teguh Prasetyo, 2000, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT RajaGraindo Persada
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim MaPPI-FHUI, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit FHUI
- Yudi Kristiana, 2006. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, 2009, *Menuju Kejaksaan Progressif; Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana  
(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih  
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. Hasil Seminar**

W. Riawan Tjandra, Makalah dalam expert meeting forum *penguatan kewenangan KPK melalui produk hukum KPK dalam mendorong efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi*, KPK RI, Surabaya 11-12 Agustus 2016.

Romli Atmasasmita, bahan paparan *koordinasi dan supervisi KPK*, diKPK, Jakarta tanggal 29 Oktober 2015

#### **D. Situs Internet**

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) diakses tanggal 26 Desember 2016

<https://polri.go.id/tentang-satwil.php#xxpolda1>, diakses tanggal 26 Desember 2016.

<https://polri.go.id/tentang-sejarah.php> diakses tanggal 26 Desember 2016

[http://www.hukumonline.com/artikel\\_detail.asp?id=3295](http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=3295), diakses tanggal 26 Desember 2016

<https://acch.kpk.go.id/id/tema/penindakan/penyidikan>, diakses tanggal 20 Januari 2017

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/180/KEPOLISIAN\\_DALAM\\_TATA.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/180/KEPOLISIAN_DALAM_TATA.pdf) tanggal 26 Desember 2016 (Makalah Kedudukan Konstitusional Kepolisian Dalam Tata Pemerintahan Negara, Jimly Ashididqie)

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/901/716> diakses tanggal 3 November 2016

<http://kbbi.web.id/efektif>, diakses tanggal 3 Maret 2016

<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>, diakses tanggal 3 Maret 2016

